

PERGESERAN KONSEP UANG DAN BUDAYA UTANG

(Persepsi Masyarakat terhadap Uang, Utang, dan kredit)
DALAM LINTAS SEJARAH^{1x}

Oleh:

Sri Ana Handayani

Fakultas Sastra Jurusan Sejarah universitas Jember

srianahandayani@gmail.com

ABSTRAC

Uang mempunyai peranan penting bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan ekonominya. Berkaitan dengan peran uang yang penting, maka tumbuh utang dan kredit. Dengan demikian, uang, utang, dan kredit dalam kehidupan masyarakat terjalin erat. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana persepsi masyarakat tentang uang dan utang era kolonial sampai kemerdekaan. (2) Apakah ada pergeseran tentang budaya utang (3) Faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran persepsi masyarakat akan uang dan budaya utang. Metode penelitian yang digunakan merupakan gabungan antara metode sejarah dan antropologi. Metode sejarah digunakan untuk menggambarkan pemahaman masyarakat tentang uang, utang, dan kredit secara kronologis, adapun metode antropologi untuk menggali cara pandang masyarakat tentang uang, utang dan kredit. Simpulan yang didapat dalam openelitian ini adalah, pada umumnya baik masyarakat Madura maupun Jawa menganggap bahwa uang merupakan alat bayar, alat hitung, dan alat hubungan sosial budaya, politik, serta agama. Utang ada yang berkaitan dengan utang sosial yaitu utang budi, juga ada yang berkaitan dengan utang ekonomi. Utang ekonomi dipahami sebagai pemberian pinjaman dalam transaksi ekonomi. Adapun kredit lebih mengarah kepada pemberian pinjaman dengan penambahan nilai pengembalian. Pembentukan lembaga kredit yang sesuai dengan pandangan dan pemahaman masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Lembaga kredit yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat paling tidak merupakan langkah awal untuk mengerakkkan ekonomi rakyat ke arah yang lebih produktif.

Kata kunci: Uang, utang, kredit, kearifan lokal, produktif.

PENDAHULUAN

^{1x}Kajian ini merupakan bagian dari penelitian dengan judul “Berkayuh Di antara Dua Arus: Persepsi Masyarakat Madura dan Jawa tentang Uang, Utang, dan Kredit”, yang dilaksanakan berdasarkan dana DP2M Universitas Jember tahun anggaran 2014 dan 2015.

Dewasa ini, peran uang, utang, dan kredit sangat penting dalam pembangunan. Baik masyarakat maupun pemerintah tidak terlepas dari peran uang, budaya utang, bahkan budaya kredit untuk membangun berbagai fasilitas, baik yang berkaitan dengan kebutuhan sandang maupun pangan. Dalam paradigma ekonomi uang dipandang sebagai sesuatu yang anonim dan netral secara sosial, sehingga kebijakan ekonomi dengan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah diseragamkan. Kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa orde baru belum dapat mencapai tujuan yang utama yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, fenomena uang dan utang perlu dikaji dari berbagai disiplin ilmu agar mendapat pemahaman tentang pola perilaku ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Mengapa uang menjadi penting terutama dalam kehidupan manusia modern? Sejak ditemukannya uang sebagai alat tukar diberbagai wilayah dunia, maka uang telah berperan besar dalam mengubah perilaku budaya manusia. Uang merupakan instrumen yang cukup penting baik sebagai sarana transaksi, komunikasi, bahkan sebagai sarana pengakuan status sosial seseorang.

Masyarakat Indonesia yang majemuk, menjadi masyarakat yang unik termasuk dalam cara memandang uang. Di satu sisi, masyarakat modern memandang uang sebagai fenomena pertukaran yang mengandung tiga hal yang penting, yaitu uang sebagai alat pembayaran, alat standar, dan alat pertukaran (Damsar,2006:45). Uang sebagai alat pembayaran berkaitan pelaksanaan kewajiban terhadap objek-objek yang dapat dipindahkan kepada pihak lain. Uang sebagai standar menunjuk kepada penyamaan sejumlah jenis barang berbeda untuk tujuan-tujuan tertentu yang berpijak pada pengertian dana dan neraca. Adapun uang sebagai sarana pertukaran merupakan hal yang berkaitan dengan pembayaran secara tunai atau langsung. Dalam masyarakat modern transaksi dilakukan secara langsung. Djojohadikusumo (1989) berpendapat bahwa uang sebagai alat bayar, alat tukar, dan alat hitung. Dengan demikian masyarakat modern yang cenderung menjadi masyarakat kapitalis memandang pasar sebagai institusi yang superior terhadap intitusi sosial lainnya yang berjalan atas logika *self regulating market* sehingga keberadaannya menjadi determinan dalam seluruh proses sosial. Di sisi lain, masyarakat yang masih hidup dengan sistem ekonomi substantif yang tinggal di pedesaan, uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang juga berkaitan dengan kehidupan sosial budaya. Fenomena uang berhubungan dengan fenomena sosial, budaya, agama, politik, bahkan religi (Adimihardja,1983). Dengan demikian, uang tidak dipandang sebagai sesuatu yang seragam. Kedua hal inilah yang pada dasarnya membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan menjadi sulit diterapkan di lapangan. Uang merupakan fenomena yang selalu menarik untuk dikaji, ilmuwan ekonomi memandang uang sebagai sesuatu yang anonim, sementara para ilmuwan sosial

memandang uang tidak terlepas dari kehidupan dan kebutuhan sosial, sehingga uang selain sebagai alat tukar juga sebagai alat dalam berinteraksi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah : (1) Bagaimana persepsi masyarakat tentang uang dan utang era kolonial sampai kemerdekaan. (2) Apakah ada pergeseran tentang budaya utang (3) Faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran persepsi masyarakat akan uang dan budaya utang.

Dengan mengkaji permasalahan ini, maka tulisan ini ini ditujukan untuk: (1) Mengkaji tentang persepsi masyarakat akan uang dan utang secara diakronis dari era kolonial sampai kemerdekaan. (2) Mengungkapkan pergeseran budaya utang dari era kolonial sampai kemerdekaan di masyarakat secara global. (3) Mengungkapkan faktor penyebab pergeseran persepsi masyarakat terhadap uang dan utang.

Riset yang mengkaji tentang pergeseran persepsi masyarakat akan uang dan utang khususnya masyarakat Madura dan Jawa di Eks Keresidenan Besuki, merupakan cerminan dari sebagian masyarakat Indonesia yang sedang menuju kepada era ekonomin pasar bebas.

Secara teoritis, Boeke sudah mengeluarkan pendapatnya tentang Dualisme Ekonomi sekitar awal abad ke-20. Boeke mengkategorisasikan struktur ekonomi Hindia Belanda dengan mengidentifikasi dikotomi yang tidak dapat dihilangkan antara perusahaan Barat dan kepentingan bisnis kolonial di satu pihak dengan ekonomi pribumi yang mencukupi kebutuhan sendiri di pihak lain. Menurut Boeke, di Hindia Belanda terjadi perubahan transformasi sejalan dengan diselenggarakannya pembangunan infrastruktur jalan seperti jaringan kereta api, akan tetapi, infrastruktur ekonomi pribumi sebagian besar tetap tidak berubah karena para produsen pribumi bertahan dengan dasar tradisional mereka. Konteks tulisan Boeke bukan untuk didiskusikan dalam artikel ini, akan tetapi sebagai dasar untuk memahami pandangan masyarakat pribumi terhadap uang kolonial yang sudah dijadikan sebagai tunggal secara nasional di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pengaplikasian dualisme pemerintahan hindia belanda di wilayah geografi melalui pembagian wilayah *ommenlanden* dan *vorstenlanden*, wilayah administrasi pemerintah Hindia Belanda dan pribumi dengan feodalismenya, serta wilayah budaya melalui pembagian struktur masyarakat kolonial tahun mengakibatkan masyarakat pribumi semakin tersudut dalam pergaulan dan perniagaan secara internasional. Hal ini berdampak bagi masyarakat pribumi dalam penggunaan uang sehari-hari, terutama di pedesaan.,

METODE PENELITIAN

Riset dengan judul Pergeseran Konsepsi Masyarakat tentang Uang dan Utang ini merupakan riset sejarah, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Gottshlak (1986) tahapan dalam metode sejarah terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan pengumpulan sumber yang relevan dengan penelitian. Sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer berupa arsip berupa Memori Serah Jabatan residen di Jawa timur, tulisan pakar Hindia Belanda yang menyelidiki kemakmuran masyarakat bumiputera. Sumber sekunder yang dapat mendukung kajian ini berkaitan dengan masa kontemporer berupa wawancara dengan masyarakat berdasarkan prosedur sejarah lisan. Sumber sekunder berupa kajian-kajian para pakar yang berkaitan dengan tema kajian ini. Kritik digunakan untuk menentukan tingkat otentitas dan kredibilitas sumber.

Interpretasi merupakan langkah untuk menganalisis data serta menyusun argumentasi. Interpretasi sejarah mengenai uang dan juga utang dalam artikel ini dengan dasar interaksi dinamis ekonomi subsisten dan ekonomi pasar mempunyai konsekuensi penting bagi interpretasi sejarah.

Tahapan historiografi merupakan tahapan penuangan argumentasi sebagai konstruk sejarah dalam bentuk narasi. Dalam riset sejarah, historiografi bukan hanya sekedar menyajikan tulisan yang bersifat deskriptif naratif, melainkan yang bersifat deskriptif analisis yang berkaitan dengan aspek prosedural dan struktural (Kartodirdjo,1986). Dalam hal ini, aspek prosedural untuk menggambarkan dinamika penggunaan uang serta utang, adapun aspek struktural untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pergeseran penggunaan uang dan utang dalam masyarakat dalam kurun waktu yang berbeda. Untuk membangun, menganalisis, dan menjelaskan kajian ini, maka penulis menggunakan pendekatan antropologi ekonomi dan sosiologi uang. Pendekatan antropologi ekonomi untuk menjelaskan gejala sosial ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan tujuan penggunaan uang (*non comercial market*), adapun sosiologi uang untuk memahami penggunaan uang dalam lingkup sosial budaya masyarakat.

HASIL PEMBAHASAN

Eks Keresiden Besuki

Secara geografis, eks Keresiden Besuki, merupakan daerah yang berada disekitar wilayah Pedalaman dan ujung timur Pulau Jawa Timur, yang sekarang meliputi daerah Kabupaten Sitobondo, Bondowoso, dan Jember. Selama Pemerintahan Hindia Belanda, Keresidenan Besuki merupakan wilayah yang cukup penting, karena merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar, baik komoditas pertanian seperti beras, juga komoditas perkebunan tanaman ekspor seperti tembakau, kopi, dan tebu. Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda mempunyai peranan penting dalam mengalokasikan semua sumber daya ekonomi Keresidenan Besuki.

Pada tahun 1780 pemerintah memperkenalkan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi pemerintah masa depan yaitu Undang-undang Agraria. Undang-undang ini mengatur hak-hak properti di seluruh Nusantara. Selain itu, membuka peluang bagi kerjasama dan mengantarkan kepada keterlibatan lebih lanjut perusahaan-perusahaan kapitalis Eropa dalam menembangkan kekuatan bisnis mereka.

Liberalisme dianggap sebagai titik balik perekonomian pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah dan perusahaan swasta setidaknya memainkan peranan penting dalam membangun jaringan jalan dan komunikasi dalam rangka mensukseskan industri mereka. Mereka memperluas areal komoditas mereka, sehingga membuka peluang kerja bagi bumiputera sebagai buruh, juga memperkenalkan beberapa pembagian kerja di sektor pribumi sendiri. Pemerintah dan perusahaan swasta mengenalkan beberapa keahlian baru yang diperlukan petani pribumi untuk memperbaiki kualitas produk pertanian mereka yang memungkinkan produk-produk pertanian petani dapat dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi (Zed,2002:304). Proses komoditisasi bersamaan dengan komersialisasi. Transformasi finansial menjadi lebih sering daripada sebelumnya. Uang menjadi bagian penting dalam bertransaksi.

Pemerintah Hindia Belanda mempunyai peran penting dalam membuka Jember yang terisolir, karena keberadaan wilayahnya berada di pedalaman wilayah Jawa Timur. Tahun 1870, dianggap sebagai titik keterbukaan Jember dalam perdagangan internasional, setelah wilayah Jember menjadi penghasil tembakau terkenal di Eks Keresidenan Besuki

Konsepsi Orang Madura tentang Uang, Utang, dan Kredit

Secara demografis, orang Madura menduduki jumlah kedua terbanyak setelah orang Jawa di wilayah eks Keresidenan Besuki. Mereka menjalankan pola budaya yang sesuai dengan konsep nilai dan moral mereka. Konsepsi kultural yang dibangun oleh masyarakat Madura berkaitan dengan ikatan kekeluargaan yang kuat, *rukun, guyub*, tolong menolong, semuanya memiliki makna sebuah kesatuan untuk hidup bersama. Sebagai sebuah pola ideal, cara hidup semacam ini menjadi acuan atau pedoman yang mereka yakini kebenarannya.

Orang Madura bermigrasi ke daerah timur Pulau Jawa jauh sebelum perkebunan swasta dibuka oleh pengusaha kulit putih. Akan tetapi, persebaran orang Madura ke daerah eks Keresidenan Besuki setelah perkebunan swasta dibuka. Orang Madura banyak yang datang ke daerah Jember, dan Bondowoso pada umumnya menjadi tenaga kerja atau buruh di perkebunan swasta, seperti perkebunan tembakau, gula, atau kopi. Sejak saat itu, sebagian besar penduduk Jawa Timur berasal dari Madura.

Dalam penulisan sejarah orang Madura era kolonial, Jawa dan Madura ditulis sebagai satu kesatuan wilayah dan kebudayaan, sehingga pemerintah kolonial melaksanakan langkah-langkah administratif dan politis yang sama untuk kedua pulau ini. Padahal antara Jawa dengan Madura mempunyai sifat-sifat khusus.

Bagaimana dengan konsep mereka tentang uang, utang, dan kredit? Tidak terlepas dari konsep budaya tentang hidup bersama yang berkaitan dengan budaya.

Konsepsi Masyarakat Madura tentang Uang

Untuk mengetahui persepsi orang Madura tentang uang, akan dikemukakan berbagai pendapat dari beberapa responden mengenai penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa informan dan responden yang ditanya tentang fungsi uang menjawab bahwa fungsi uang sebagai berikut “ Zaman sekarang zamannya uang, tanpa memiliki uang mau apa, semua dibeli dengan uang, uang untuk memenuhi segalanya, orang akan hidup susah apabila tidak punya uang, kalau enggak punya uang yang *direwangi* ngutang“. Begitu penting peran uang dalam kehidupan mereka.

Bagaimana apabila seseorang tidak memiliki uang, maka sebagian besar responden menjawab ya ngutang dulu aja, perkara bayar gimana nanti, apalagi kalau itu untuk kebutuhan siklus kehidupan atau selamatan. Jenis uang yang diketahui oleh masyarakat tertama di pedesaan adalah uang kertas dan logam, karena uang kertas dan logam yang sehari-hari digunakan untuk bertransaksi. Uang yang di masyarakat rata-rata sekarang uang kertas, karena dianggap praktis. Di pasar atau kembalian dari angkutan umum rata-rata kondisi uang kertas sudah lusuh tidak rapih dan kencang, karena perputaran uang kertas lebih cepat sementara penggantian uang kertas tidak cepat. Perpindahan dari satu tangan ke tangan lainnya tanpa ada tempat penyimpanan uang yang memadai mengakibatkan kondisi uang kertas lebih sering lusuh. Demikian juga dengan uang logam, kondisinya sudah tidak bagus, padahal perputaran uang logam jumlahnya lebih kecil karena nominal paling tinggi uang logam hanya Rp. 1.000,.. Uang logam hanya dimanfaatkan dalam lingkup yang lebih kecil, sebagai uang *kembalian* dari jual beli, atau untuk acara-acara ritual yang berkaitan dengan uang.

Pada umumnya, responden mengatakan bahwa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau biaya hidup, yaitu untuk konsumsi, biaya pendidikan, sumbangan, zakat, dan sebagainya. Uang bukan saja dipergunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, melainkan juga sebagai alat perekat hubungan dengan saudara dan tetangga, masyarakat Madura dikenal sangat kental dengan hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan teori ekonomi, uang dipandang sebagai sesuatu yang anonim secara budaya dan netral secara sosial (Damsar, 2006:18). Adapun fungsi uang sebagai: alat tukar, satuan hitung, penimbunan kekayaan, dan standar (Sinungan,1991:5-6). Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Madura, ternyata uang tidak bebas nilai dalam pengertian ekonomi klasik di atas, uang mempunyai fungsi sosial.

Praktis, penggunaan uang sehari-hari lebih banyak ke arah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dibandingkan dengan hal yang berkaitan dengan produktivitas, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah bawah. Sumbangan finansial bagi para tetangga atau saudara merupakan ekspresi budaya dari kebiasaan sosial dalam kehidupan orang Madura. Sumbangan sosial ini secara teoritis merupakan rasa *guyub*, yang apabila diamati ternyata sumbangan sosial finansial ini merupakan suatu tindakan yang bersifat timbal balik atau suatu bentuk investasi antar warga. Sumbangan finansial yang diberikan seseorang pada suatu saat akan dikembalikan oleh penerima, dengan jumlah yang sama atau lebih. Bagi masyarakat yang mengingkari cara timbal balik ini akan terkena sanksi sosial berupa bahan pergunjungan tetangga ke arah citra yang negatif. Kebutuhan uang yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Madura berkaitan dengan menengok orang sakit, menyumbang keluarga yang meninggal, menyumbangkan orang yang punya hajatan, menyumbang kegiatan keagamaan, memberi tips apabila mengurus administrasi di tingkat instansi pemerintah, dan sebagainya.

Sumbangan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu waktu tetangga atau saudara mengadakan acara selamatan siklus kehidupan, berupa kelahiran, pernikahan, dan kematian. Di antara ketiga selamatan tersebut, selamatan pernikahan yang diadakan selalu menyedot biaya besar. Pada saat suatu keluarga melahirkan seorang bayi, maka tetangganya akan berdatangan untuk melihat dan mengucapkan rasa senangnya terhadap kelahiran bayi tersebut, tidak lupa dengan membawa sesuatu berupa barang (pakaian bayi, peralatan bayi, bahkan makanan) atau uang. Tidak ada besaran nominalnya. Apabila ada kematian, maka tetangga akan membawa uang duka atau barang dalam bentuk gula, mie, atau beras, atau juga uang. Besaran uang rata-rata Rp. 15.000,- atau kalau dalam bentuk barang, harganya senilai dengan besaran uang.

Pada saat acara pernikahan agak berbeda, karena acara pernikahan selamatannya direncanakan jauh sebelumnya dan melibatkan orang banyak, baik saudara maupun tetangga. Jumlah nominal uang yang disumbangkan cukup besar dibandingkan dengan sumbangan untuk kematian atau kelahiran. Nominal yang diberikan minimal sekitar Rp. 25.000,-. Alasannya karena sumbangan pada saat acara pernikahan pada umumnya dicatat oleh yang mengundang, sehingga nominalnya dapat diketahui oleh pengundang.

Sumbangan untuk kegiatan keagamaan juga banyak dijalankan oleh masyarakat Madura. Orang Madura merupakan Masyarakat yang religius, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan sumbangan untuk keagamaan selalu diusahakan ada. Bentuk sumbangan berupa zakat, sedekah, pembangunan mesjid, serta kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, kegiatan ini dianggap sebagai salah satu bentuk amal ibadah di dunia ini.

Orang Madura terkenal karena kereligiusannya, ciri khas Islam melekat dalam budaya berpakaian mereka, seperti kain sarung, songkok, dan baju muslim bagi kaum laki-laki, berkerudung dan pakainan panjang bagi kaum wanitanya. Pandangan mereka tentang uang yang berkaitan dengan keagamaan tercermin dalam pembagian zakat, terutama zakat fitrah. Beramal dari sebagian rezekinya merupakan salah satu jalan memenuhi rukun Islam. Seseorang yang dianggap kaya, berusaha untuk menyisihkan kekayaannya untuk berzakat. Zakat kadang tidak anonim, ada juga yang lebih suka dibagikan langsung. Zakat fitra untuk perempuan kadang berupa baju, untuk laki-laki berupa sarung, baju, atau kopiah. Zakat amal diberikan dalam bentuk uang yang

dimasukkan dalam amplop tertutup. Jumlah zakat kadang mencapai puluhan jutaan rupiah. Zakat fitrah diantar ke rumah-rumah orang yang dianggap berhak menerimanya. Kadang juga zakat langsung diberikan kepada yang berhak menerima. Menurut beberapa informan, penerima zakat tidak semuanya termasuk ke dalam golongan tidak mampu, pada kenyataannya sering juga seseorang yang dianggap penting oleh pemberi zakat, maka semakin besar nominalnya. Bahkan, seorang kiayi akan menerima lebih besar dibandingkan dengan yang yang lainnya.

Rukun Islam mengharuskan orang untuk membagikan 2,5% dari nilai barang yang dimilikinya lebih dari satu tahun sebagai zakat, sehingga orang kaya yang beriman berusaha untuk menyisihkan dan membagikan keuntungan dari usahanya. Apabila tidak melakukannya, atau seseorang yang dianggap kaya tetapi belum melakukan hal ini, maka ia akan terkucilkan, atau dianggap tidak soleh. Selain zakat juga, orang Madura mengenal sedekah. Sedekah ini diberikan secara sukarela kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, entah itu dalam bentuk uang atau makanan. Bagi para pedagang besar yang bergelar haji, pada umumnya banyak menyumbangkan uangnya untuk kegiatan keagamaan. Hal ini menggambarkan makna agama untuk mempertahankan hubungan yang khususnya mempunyai makna sosial sekaligus ekonomi.

Bagi orang Madura (pada dasarnya orang Indonesia), naik haji mempunyai makna sosial. Di samping telah menunaikan rukun Islam yang kelima, orang yang telah naik haji akan dipanggil Pak Kaji, dan prestisenya naik. Karena itu, tidak heran bila tujuan hidup orang Madura adalah ibadah haji ke Mekkah.

Kehidupan orang Madura sehari-hari tidak lepas dengan dimensi agama, Selain sholat lima waktu, mereka pun melakukan peringatan hari penting Islam, misalnya selama Asyuro mereka membuat jenang suro, selama bulan safar mereka membuat jenang safar, pada saat Mauludan mereka memperingatinya dengan selamatan Mauludan

Dapat dikatakan selamatan merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh setiap orang terutama di pedesaan, terutama dalam bulan-bulan yang cocok untuk melangsungkan perkawinan, memperingati kelahiran atau kematian. Selamatan diadakan oleh perorangan, atau bahkan desa, seperti bersih desa, kadang acara selamatan diadakan untuk mengucapkan syukur atas keberhasilan seseorang dalam usaha, pendidikan, membangun rumah, dan sebagainya. Acara-acara selamatan ini sudah barang tentu memerlukan banyak biaya. Kebutuhan akan biaya inilah, yang kadang-kadang kurang rasional, maksudnya tidak terlalu memperhitungkan besaran pendapatan dan pengeluaran. Kadang mereka berhutang terlebih dahulu kepada tetangga yang dianggap punya uang, atau kepada rentenir. Dalam konsepnya yang penting ada uang untuk mengadakan acara-acara selamatan, supaya tidak malu nantinya kalau tidak dapat melaksanakan acara selamatan.

Memang dalam acara selamatan ada yang merasa sebagai hal yang *guyup*, toleransi, dan gotong royong. Dalam ilmu sosial hal ini dinamakan sebagai pertukaran timbal balik atau resiprositas. Resiprositas ini merupakan abstraksi dari proses ekonomi yang kongkrit yang dalam kenyataannya selalu mengandung unsur-unsur yang tercampur tidak murni. Pada umumnya berbeda dalam bentuk pemberian, yaitu yang satu berupa tenaga kerja, yang satunya berupa materi (uang).

Timbal balik biasa terjadi pada pertukaran kebutuhan yang tidak terlalu urgen seperti pinjam meminjam barang antara tetangga. Timbal balik seimbang, seperti dalam konsep *onjengan*, dan *parloh*, adapun timbal balik yang tidak seimbang adalah ikatan antara orang tidak punya dengan orang kaya di mana pemberian dari pihak yang kaya pada dasarnya ada unsur politis sepihak.

Uang dipahami sebagai alat tukar dan alat bayar utang piutang yang cepat dan mudah, baik secara tunai maupun secara angsuran. Masyarakat beranggapan bahwa uang

punyai peranan penting untuk melangsungkan kehidupan sosial ekonominya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah memahami bahwa uang sebagai instrumen ekonomi, yaitu sebagai alat tukar dan alat bayar.

Apabila dikaji lebih jauh, bagi masyarakat Madura, uang bukan hanya sekedar instrumen ekonomi yang secara pragmatis untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, perlu juga dipahami tentang pengertian kebutuhan hidup sehari-hari, karena kebutuhan hidup itu bukan saja untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan, melainkan untuk juga kebutuhan sosial budaya, agama, politik, bahkan juga psikologis.

Konsepsi Kultural Etnis Jawa tentang Uang, Utang, dan Kredit

Dalam upaya melakukan pemahaman terhadap situasi sosial budaya suatu masyarakat, terlebih dahulu perlu dijabarkan tentang suatu fakta bahwa Suku Jawa tidak merupakan sebagai suatu kesatuan suku bangsa yang semuanya bersifat homogen. Apabila di kaji lebih dalam, maka masyarakat Jawa memiliki sifat kemajemukannya, yang ditandai oleh adanya sub groups. Tiap kelompok memiliki sistem budayanya sendiri yang bersifat khas sehingga dalam kebudayaan Jawa terdapat sub-sub kebudayaan atau *sub cultures*. Secara fakta suku Jawa terkesan ada keanekaragaman budaya Jawa yang besar. Akan tetapi, di balik keanekaragamannya itu ada unsur yang memberi identitas budaya Jawa. Jadi dasar dari sistem budaya yang memberi identitas kelompok atau sub group adalah sub kultur yang merupakan varian budaya Jawa itu sendiri.

Nilai-nilai budaya Jawa yang relevan dengan permasalahan uang, utang, dan kredit berkaitan dengan, rukun, sungkan, medit (pelit), kuasa (kekuasaan) yang dalam hal-hal tertentu berbaur dengan sikap *nrima* yang fatalistik. Uang dapat menciptakan perasaan inferior juga superior pada diri individu, sehingga memiliki uang merupakan dambaan setiap individu.

Penelitian yang berkaitan dengan uang, utang, dan kredit dilakukan di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Desa Kilensari Kabupaten Situbondo, dan Desa Puser Bumi kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Aktivitas sosial, ekonomi, dan politik mewarnai kehidupan masyarakat, seperti aktivitas ekonomi di Desa Wonorejo menunjukkan dualisme budaya pedesaan dan perkotaan. Hal ini dapat diperhatikan dengan adanya masyarakat yang masih subsisten dan masyarakat yang sudah berorientasi kepada pasar. Aktivitas subsisten diwakili oleh petani dan pedagang kecil, sedangkan aktivitas komersial (pasar) menjelma pada institusi-institusi finansial, perdagangan skala besar dan kegiatan bisnis lainnya.

Perdagangan komersial melibatkan pemodal berskala besar, aktivitas perdagangannya jarak jauh, distribusi dan penjualan barang-barang dari dan ke kota besar. Dalam bidang subsisten, adalah petani dan pedagang dengan modal berskala kecil. Mereka melangsungkan perdagangan sebagai strategi untuk kelangsungan hidup karena tujuan esensial dari perdagangannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Perdagangan subsisten dilakukan oleh para *mlijo* (pedagang eceran yang berkeliling dari rumah ke rumah), pedagang kecil di pasar tempatnya di trotoar pasar, tidak memiliki lapak yang permanen karena tidak memiliki modal dalam skala besar.

Pandangan Masyarakat Jawa Di Pedesaan terhadap Uang

Untuk memahami persepsi masyarakat Jawa tentang uang, maka tim peneliti memperlihatkan uang kepada salah seorang responden dalam bentuk 5 dolar Singapura dan 5 ribu rupiah. Kedua pecahan tersebut ditawarkan kepada seorang responden yang sedang diwawancarai, ia menggelengkan kepala ketika pecahan 5 dolar Singapura diberikan. Pada saat ditanyakan mengapa memilih uang dengan nominal Rp.5000, dengan santai ia mengatakan uang yang satunya tidak laku (*bonten laku*). Berbeda dengan seorang responden yang bergelar haji, pada saat ditawarkan uang dalam bentuk real dan rupiah, ia langsung mengambil kedua uang tersebut, karena ia menganggap baik uang rupiah maupun real sama-sama laku. Bahkan, ia menganggap uang real nilainya lebih tinggi, dan punya kesan emosi dengan uang real tersebut (dengan semangat ia bercerita pada saat menjalankan ibadah haji). Pandangan laku dan tidak laku suatu mata uang merupakan fenomena yang perlu dikaji lebih jauh.

Fenomena laku dan *bonten laku* (tidak laku) tentang uang di pasaran tidak hanya terkait dengan otoritas perbankan, tetapi juga terkait dengan otoritas sosial budaya masyarakat. Bagaimana masyarakat memaknai uang, kata *bonten laku* bukan berarti menafikan otoritas perbankan karena pecahan lain diterima, melainkan aktor sosial memasukkan otoritas sosial budaya yang dimilikinya dalam melakukan transaksi. Dengan demikian, otoritas perbankan telah ditumpangi oleh otoritas sosial budaya dalam menentukan keberlakuan uang dalam masyarakat tertentu.

Pada saat memperhatikan sirkulasi uang di pasar-pasar tradisional, kondisi uang sudah banyak yang *lecek* (lusuh). Seseorang pembeli menggenggam lembaran-lembaran uang kertasnya dengan erat, dalam lembaran tersebut tercampur antara uang yang masih layak digunakan dan sudah tidak layak digunakan karena *lecek* (lusuh), hal ini menandakan bahwa sirkulasi uang di pasar tradisional sangat cepat dan sering. Seorang pedagang mengatakan

“saya tidak mungkin menolak pembayaran uang dari pembeli walaupun uangnya sudah jelek begini. Tapi uangnya saya simpan. Soalnya jarang ada pembeli lain yang mau dengan uang pengembalian yang *lecek* begini. Uang kertas antara Rp. 1.000, sampai Rp. 5.000, yang sering *lecek*, kalau yang lainnya engga terlalu *lecek*, kadang-kadang ada coretannya sih kaya nomer hp gitu. Biasanya dikumpulkan dulu, nanti kalau sudah banyak ditukarkan ke bank saja,”.

Bagi pedagang uang yang sudah *lecek* tetap dapat dijadikan sebagai alat tukar, akan tetapi bagi pembeli uang *lecek* dianggap tidak baik karena takut tidak dapat dibelikan di tempat lain sebagai alat tukar. Persepsi terhadap uang lusuh dan rusak di mata masyarakat pun berbeda-beda.

Setiap orang memandang uang berbeda-beda, ada yang menganggap uang adalah segalanya dalam hidup ini, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa uang hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Seseorang menjadi *risih* (perasaan tidak nyaman) manakala seseorang ditanyai tentang kondisi keuangannya. Dewasa ini, uang mempunyai magnet yang kuat dalam kehidupan masyarakat, karena budaya konsumtif sudah sangat merasuki kehidupan masyarakat di pedesaan yang terpencil sekalipun.

Sebagian besar responden menjadi bingung apabila ditanyakan apa makna uang bagi mereka. Pada saat ditanya kegunaan uang untuk apa, baru mereka dapat menjawab, bahwa uang untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, terutama untuk membeli kebutuhan pokok, seperti beras, minyak kompor (sekarang sudah beralih ke gas). Apabila ada sisa uang baru digunakan untuk membeli pakaian, menyumbang kepada orang lain pada saat-saat tertentu, atau memperbaiki rumah.

Setelah merasa akrab dengan peneliti, baru mereka mengungkapkan bahwa uang itu selain untuk membeli kebutuhan sehari-hari juga untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran lainnya, seperti untuk menyumbang tetangga apabila ada hajatan, selamatan, kematian, kelahiran, dan membayar kewajiban lainnya seperti dan utang piutang.

Orang-orang di desa selalu mengadakan selamatan, terutama pada bulan-bulan yang cocok untuk melangsungkan selamatan. Selamatan dilaksanakan berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, dan pada saat memperingati hari-hari besar keagamaan. Selamatan diadakan oleh perorangan yang selalu melibatkan orang lain dalam hal ini tetangga dekat serta saudara yang tinggal didekatnya. Persiapan selamatan memakan waktu sehari-hari, walaupun acara selamatannya berlangsung dalam beberapa jam saja. Pada prinsipnya, selamatan dilaksanakan untuk memohon berkat dari Allah. Beberapa responden mengatakan dalam acara selamatan tentu memerlukan banyak uang, akan tetapi jangan bingung dengan uang, kalau kita rela memberi uang sebagai sumbangan, maka suatu saat rezeki itu akan balik lagi.

Uang sangat diperlukan oleh masyarakat, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup juga untuk mencukupi keperluan lain yang berkaitan dengan hubungan sosial. Uang tidak berdiri sendiri. Pengeluaran untuk hal-hal tak terduga yang berkaitan dengan hubungan sosial terutama di pedesaan lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan masyarakat kota.

Sumbangan yang sering diberikan selain dalam cara pernikahan adalah melayat yang sakit, meninggal, melahirkan, acara sunatan, hajian, dan sebagainya. Pada umumnya bentuk sumbangan untuk keluarga yang berduka karena kematian dalam bentuk barang bukan uang, seperti gula, mie, beras. Gula sekitar satu-dua kilo, beras sekita satu-dua kilo, mie ukuran sedang dua bungkus. Ada juga yang memberi dalam bentuk uang dengan nilai yang sama apabila dibelikan barang. Pada saat memberi sumbangan kepada keluarga yang meninggal, orang-orang tidak terlalu menghitung finansial, tanpa diundang pun orang-orang dengan penuh kesadaran berdatangan untuk *layat* dan memberikan sumbangan. Seseorang menyumbang kepada keluarga yang ditinggal oleh sanak keluarganya merupakan ungkapan rasa duka cita, atau simpati terhadap keluarga yang ditinggalkannya, nominal uangnya seadanya, tidak ada target untuk itu.

Di sisi lain, keluarga yang meninggal pun berusaha untuk menjadi masyarakat yang baik. Pada umumnya tidak semata-mata menerima uang duka saja, tetapi berusaha untuk menyediakan makanan terutama untuk yang melayat dan ikut mengantar sampai makam. Setelah itu ada acara tahlilan dan pada hari ke tujuh tahlil, para tamu diberi bungkus makanan untuk dibawa pulang. Selain tujuh hari ada empat puluh hari, seratus hari, sampai seribu hari, acara tahlil selalu

diadakan, kecuali orang-orang tertentu yang memang tidak melaksanakan tradisi tahlilan.

Selamatan merupakan acara ritual yang diungkapkan dengan praktek makan bersama (slamet) yang menegaskan komunalitas peserta dalam usaha menciptakana keberadaan yang damai (slamet) di dunia yang penuh bahaya ini. Pada tingkat interaksi komunal yang lebih horizontal, hidup harus ditandai dengan hubungan yang harmonis (*rukun*). Pada dasarnya hubungan ini disusun secara diadik dalam sebuah stuktur kewajiban timbal balik yang mengikat individu satu sama lainnya. Penerimaan orang lain bersifat pragmatik, orang membutuhkan orang lain dalam hidup ini, oleh karena itu ia harus bekerja sama dan memenuhi harapan satu sama lsinya. Dengan menjaga hubungan yang teratur, tiap orang memperbesar kesempatannya memperoleh hidup yang tenang sambil tetap terpenuhi kebutuhan hidupnya (Mulder,1999:193).

Penyelenggaraan selamatan sudah barang tentu memerlukan uang, akan tetapi pada saat ditanyakan berapa pengeluaran yang diperlukan dalam suatu kegiatan selamatan, rata-rata responden tidak dapat menentukan jumlah nominalnya secara pasti. Sudah menjadi kebiasaan apabila seseorang yang akan mrengadakan selamatan hanya memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan. Pada umumnya orang yang mengadakan selamatan tidak pernah mencatat jumlah pengeluaran untuk kegiatan selamatan. Dalam arti ekonomis, kegiatan selamatan ini dapat saja menggambarkan kekayaan seseorang yang sebenarnya, jadi dalam hal ini harus dianalisis bahwa fenomena uang sangat komparatif. Dalam hal ini kekayaan berhubungan dengan status sosial dan kemakmuran yang relatif dengan persepsi ekonomi masyarakat (orang Madura ada istilah *tonjokkan* dalam mengundang seseorang)

Untuk *tilik* bayi, biasanya orang-orang membawa sumbangan dalam bentuk makanan seperti buah pisang, atau dalam bentuk barang seperti sabun cuci, baju bayi, dan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan bayi. Sumbangan ini sebagai rasa ikut bergembira atas kelahiran warga baru di daerahnya. *Tilik* bayi dilakukan kepada tetangga dekat atau famili.

Dalam acara pesta pernikahan atau sunatan sebagian besar responden mengatakan rata-rata memberikan *bowo* (bentuk uang) dengan jumlah nominal minimal sekitar Rp 25.000, sampai Rp. 30.000,. Jika seseorang merasa posisinya lebih tinggi baik secara ekonomi maupun sosial, maka ia akan memberikan lebih besar dari rata-rata masyarakat lainnya. Hal ini berkaitan dengan gengsi sosial. Apabila ia memberi *bowo* kurang dari rata-rata, maka ia akan menjadi bahan gunjingan, *wong sugih sing medit* (*sing sugih ning medit*). Di sisi lain, ada juga orang kaya yang memang sengaja memberi *bowo* lebih agar dihargai oleh masyarakat, terutamna dari masyarakat golongan ekonomi yang lebih rendah darinya. Dalam hal ini ia menunjukkan posisi sosialnya sebagai orang kaya yang harus dihargai oleh masyarakatnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa uang bagi masyarakat pedesaan tidak hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi semata-mata, tetapi juga untuk tujuan sosial, yaitu digunakan sebagai instrumen ekonomi sekaligus sebagai simbol statu sosial.

Bagaimana dengan orang yang dikategorikan tidak mampu, apabila menghadapi masalah undangan dari tetangga atau saudara. Secara finansial, ia

tidak mampu untuk memberikan sumbangan dengan batas rata-rata, maka tenaganya yang digunakan untuk membantu mengerjakan pekerjaan yang dapat dilakukan pada saat pesta hajatan. Misalnya, istrinya membantu di bagian belakang istilahnya *rewang* (membantu memasak dan mencuci yang kotor), sementara suaminya juga menyumbangkan tenaga, yaitu membereskan rumah, halaman rumah, mengantarkan undangan, dan sebagainya. Dengan demikian, mereka tetap menjadi bagian dari masyarakat sekitarnya. Pada umumnya mereka juga tetap memberikan sumbangan kepada orang yang mempunyai hajatan hanya nominalnya kecil, di bawah rata-rata. Penggunaan uang yang berkaitan dengan kehidupan yang *rukun* merupakan instrumen sosial budaya yang tidak terlepas dari norma-norma sosial.

Scott (1976) mengatakan bahwa sumbangan finansial yang diberikan oleh seseorang untuk orang lain dapat dipandang sebagai bentuk jaminan sosial (*social insurance*). Dengan adanya lembaga sosial seperti ini, yaitu memberikan kontribusi kepada orang yang tengah mengalami keadaan situasi tertentu, maka mereka tercatat sebagai salah seorang yang menjadi penerima bantuan dari orang yang menerima sumbangan. Jaringan hubungan dari jaminan sosial ini terus menerus diinterpretasikan selama proses interaksi berlangsung. Besar kecilnya uang yang diberikan tidak terkait dengan kemampuan ekonomi yang bersangkutan, tetapi juga dipengaruhi interpretasi jaringan sosial yang berlangsung.

Sebagian responden juga mengatakan bahwa uang dipakai untuk membayar pajak, pajak tanah, pajak rumah, iuran R.T. (Rukun Tetangga). Masyarakat tidak terlalu bingung dengan pajak yang ditarik pemerintah, karena dilakukan satu tahun satu kali, tetapi kadang-kadang mereka juga agak pusing, karena tidak memiliki uang pada saat jatuh tempo untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat desa belum paham mengapa pemerintah menarik pajak pada mereka, karena belum menyadari penting membayar pajak secara individu, maka biasanya agak sulit. Kesadaran membayar pajak masih harus disosialisasikan dengan tekun, agar masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah akan dinikmati kembali oleh mereka melalui pembangunan fasilitas transportasi, pengairan, dan sebagainya.

Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat cukup kuat. Hampir setiap responden berusaha untuk membayar zakat, terutama zakat fitrah. Dalam hal ini, uang mempunyai arti religius. Norma-norma agama sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Norma agama yang berkaitan dengan uang antara lain adalah zakat dan sedekah. Zakat adalah sumbangan finansial yang harus dibayarkan oleh seorang muslim yang mampu, sekitar 2,5% dari penghasilan. Adapun sedekah merupakan sumbangan yang diberikan bagi orang yang dianggap tidak mampu baik secara ekonomi maupun sosial. Intinya baik sedekah maupun zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan.

Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran finansial untuk berzakat dan bersedekah, tidak terlepas dari kegiatan atau aktivitas keagamaan mereka melalui perkumpulan pengajian yang diadakan secara rutin di daerahnya. Dalam kegiatan pengajian secara rutin, selain memberikan ajaran agama Islam, juga memberikan kesadaran kepada masyarakat akan kewajibannya sebagai umat muslim dalam

berzakat dan bersedekah. Juga dikenalkan dengan konsep riba atau bunga yang diharamkan oleh agama.

Dalam realitas keseharian, masyarakat menggunakan uang sebagai instrumen politik. Masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang berkecimpung di bidang wirausaha, mengungkapkan bahwa apabila mereka berhadapan dengan birokrat dalam mengurus sesuatu baik yang berkaitan dengan usaha maupun yang berurusan dengan personal selalu menggunakan uang untuk memperlancar pekerjaannya. Uang sangat berperan untuk mempercepat segala urusan walaupun ia menyadari bahwa itu bukan merupakan bagian dari administrasi tapi sebagai uang pelicin (suap). Komodifikasi aktifitas politik di Indonesia sudah menjalar ke berbagai pelayanan umum, seperti membayar pajak, membuat akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan sebagainya. Secara umum sudah diketahui bahwa hubungan dengan birokrasi pemerintah, seseorang harus menggunakan suap. Situasi seperti ini membuat masyarakat menggunakan uang sebagai instrumen politik terlepas dari norma-norma sosial.

Di sisi lain, ada beberapa responden yang tidak setuju dengan pendapat responden lainnya yang berkaitan dengan politik yang terlepas dari norma-norma moral yang berujung pada pemahaman korupsi. Seorang responden mengatakan bahwa uang tidak identik dengan kekuasaan yang jahat (dalam hal ini menimbulkan korupsi). Seorang responden mengatakan bahwa ia memberikan uang kepada seseorang di birokrasi yang telah membantu memperlancar urusannya, hal itu dianggap wajar sebagai ungkapan rasa terima kasih. Jadi prinsip moralitas masih dipertahankan, memberi uang bukan dalam arti negatif (bukan suap). Pada posisi ini uang mempunyai makna ganda, di satu sisi bisa dimaknai sebagai cetusan simpati, di sisi lain sebagai cetusan antipati karena dianggap sebagai suap. Jadi apabila ditujukan untuk memperoleh kemudahan dan tidak berbelit, uang pemberian uang menjadi tidak bermoral (suap), apabila ditujukan sebagai ungkapan terimakasih karena sudah memperlancar administrasinya, maka pemberian uang sebagai rasa terimakasih (uang dimaknai sebagai hubungan sosial) atau hadiah bukan korupsi.

Uang berkaitan dengan instrumen politik berkaitan erat dengan pemilihan kepala desa. Secara teoritis tidak ada pengeluaran yang besar, tetapi dalam faktanya ternyata seseorang yang menjagokan dirinya untuk maju menjadi kepala desa harus siap baik mental maupun finansialnya. Hal ini mirip dengan pepatah orang Jawa *dhuwit iku kuasa*, artinya siapa yang mempunyai uang menjadi lebih mudah untuk mencapai tujuan, termasuk berkuasa. Dalam fakta sosial, maka uang sangat berperan dalam mempengaruhi warga untuk memilih seseorang. Beberapa responden mengatakan memang uang bukan segala-galanya, kepribadian calon pemimpin pun dilihat oleh masyarakat. Sebagian responden tidak akan menjawab apabila ditanyakan apakah diberi uang oleh para calon kepala desa? Beberapa responden mengatakan uang bukan jaminan bagi seseorang untuk menang dalam pemilihan seorang kepala desa. Akan tetapi faktanya, para calon harus menyediakan uang yang cukup banyak untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan pemilihan dirinya, seperti menyediakan makanan setiap saat selama masa menjelang pemilihan bagi relawan, tim sukses, bahkan warga, menyediakan akomodasi dan transportasi untuk mensukseskan dirinya, serta paling tidak ada

uang rokok (uang lelah) bagi tim sukses. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh.

Struktur sosial masyarakat Jawa dewasa ini, belum dapat melepaskan diri dari simbol-simbol kebesaran masa lalu, terutama masyarakat tradisional. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya *adiluhung* masih melekat erat dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa. Menurut Soedarso (dalam damsar,2000:102) dalam struktur sosial masyarakat Jawa pada waktu dulu menganggap suatu kekuasaan itu tinggi apabila: Kekuasaan yang tinggi diakui tampak dari kemuliaan karena pengikutnya yang setia, hiasan yang mahal dan tindakan yang gagah dari yang berkuasa itu. Kesadaran akan kelebihan diri sendiri daripada orang biasa serta pengakuan tingkatan tinggi rendah dalam masyarakat senantiasa dipupuk dengan bentuk-bentuk yang hidup. Pengeluaran dan pengabdian yang berlebihan, penghormatan dan khimat dan tanda kebesaran yang mengagumkan, kesemuanya itu menimbulkan rasa bahwa kelebihan itu adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh serta adil adanya. Soal pangkat, kebesaran keraton, penghormatan dan upacara dianggap hal-hal yang luar biasa penting.

Ada tiga hal yang penting yang dapat disarikan berhubungan dengan kekuasaan yaitu, pertama kekuasaan, kedua finansial berupa hiasan yang mahal, dan yang ketiga adalah tindakan yang gagah atau keberanian. Pengikut yang setia merupakan cerminan dari hubungan yang bersifat vertikal atasan bawahan yang bersumbu pada nilai keselarasan dan keharmonisan masyarakat Jawa. Hubungan atasan dan bawahan yang memerlukan loyalitas yang tinggi dari bawahan mensyaratkan perlunya kemampuan pemimpin untuk memberikan perlindungan kepada bawahan secara material dan moral. Kemampuan memberikan perlindungan material berhubungan dengan akumulasi dan distribusi kekayaan. Akumulasi kekayaan berasal dari upeti bawahan yang dipandang sebagai ucapan terimakasih dari rakyat. Distribusi kekayaan merupakan ungkapan perlindungan. Tindakan yang gagah diinterpretasikan sebagai perlindungan moral kepada bawahan oleh atasan berupa jaminan atas stabilitas jabatan yang dimiliki dan direstui atas segala aktivitas yang dilakukan. Kedua jaminan tersebut diperlukan bagi harmonisasi dari hubungan timbal balik antara atasan dengan bawahan. Dari pendapat di atas, maka uang sebagai instrumen politik di pedesaan berlangsung dengan sendirinya.

Ide budaya yang berkaitan dengan kesetiaan, kepemilikan finansial, serta tindakan yang gagah masih mempengaruhi masyarakat Indonesia dewasa ini, khususnya masyarakat Jawa. Dalam realitas sosial, hubungan atasan dan bawahan atau pemimpin dan pengikutnya diikat oleh hubungan kesetiaan dan perlindungan yang tidak jauh dari kebutuhan akan kenyamanan bagi bawahan, dan kemampuan finansial dari atasan untuk menjaga kesetiaan dan kenyamanan bawahan. Istilah *Dhuwit iku kuwoso*, yang artinya uang itu memiliki kekuasaan berkaitan dengan akumulasi dan distribusi kekayaan yang sekarang wujudnya adalah uang. Seberapa besar kekuasaan uang disimbulkan dalam seberapa besar numerik yang tercetak dalam uang tersebut. Semakin tinggi angka numeriknya semakin tinggi pula kekuasaan uangnya. Dengan kata lain semakin banyak seseorang memiliki uang maka semakin tinggi kerkuasaan riilnya yang ada dalam genggamnya. Maka uang

yang dimiliki oleh seseorang merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tersebut (Nugroho,2000:237).

Pertumbuhan ekonomi yang sedemikian rupa dewasa ini di pedesaan, tidak hanya mengubah tingkat ekonomi dan sosial, tetapi juga mengubah nilai-nilai atau norma-norma. Sebelumnya terkait dengan nilai dan norma ideal yang berkaitan dengan nilai keagamaan, budaya, dan sosial, sekarang norma-norma tersebut diganti oleh norma-norma yang kasat mata atau materi (uang).

Dapat dikatakan bahwa masyarakat masih terbelah memahami penggunaan uang sebagai instrumen politis. Ada masyarakat yang menolak pandangan bahwa uang sebagai media untuk memahami kehidupan sosial. Nilai moral uang berkaitan dengan sosial, jika uang digunakan untuk menghadapi semua bentuk aktivitas ekonomi, tidak lebih tidak kurang. Korupsi merupakan pandangan atau konotasi negatif uang dalam masyarakat tradisional (Nugroho.2000:97). Dari sini masih ada ruang untuk mendiskusikan hubungan antara norma dan uang sebagai sebuah realitas sosial.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para responden, maka didapat pemahaman bahwa uang tidak hanya digunakan sebagai alat pertukaran untuk kebutuhan ekonomi, tetapi juga dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan juga politik. Uang dapat digunakan untuk memperoleh barang-barang sosial berupa, pendidikan, produk-produk yang melambang prestise sosial seperti perangkat elektronik canggih, mobil, dan barang yang dianggap mewah lainnya. Anggapan masyarakat masih melihat materi sebagai ukuran status sosial seseorang. Semakin banyak seseorang memiliki barang-barang konsumsi, semakin meningkat status sosialnya. Dengan demikian, mereka mengalami peningkatan posisi sosial, ekonomi, dan politik di mata masyarakat.

Sebagian besar responden berpendapat bahwa uang sebagai alat pembayaran dan pertukaran. Pengertian masyarakat bahwa uang sebagai alat pembayaran berkaitan dengan penggunaan uang. Apabila uang digunakan sesuai dengan fungsinya, maka kondisi masyarakat akan damai. Sebagian besar masyarakat berharap agar penggunaan uang oleh masyarakat tidak sampai menciptakan tekanan-tekanan sosial. Sistem sosial yang masih kuat di negara Indonesia seperti tolong menolong tetap harus dipertahankan, sehingga masyarakat tidak terbawa arus penyalahgunaan uang ke arah konsumtif yang tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Uang penting untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, tetapi juga uang seharusnya tidak menderteminasi seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain uang punya fungsi ekonomi dan sosial. Fungsi ekonomi uang untuk membeli sesuatu atau kebutuhan hidup. Fungsi sosial uang, adalah merupakan ekspresi budaya dan kebiasaan sosial sebagai bentuk pertukaran, dalam bahasa mereka adalah sumbangan. Seseorang yang tidak mengikuti kebiasaan masyarakat setempat dalam aturan sumbang menyumbang akan menjadi bahan pergunjungan negatif dari para tetangga. Sebutan terhadap orang yang tidak ikut dalam aktivitas sumbang menyumbang dalam masyarakat akan mendapat sanksi sosial, berupa pengucilan karena dianggap orang yang tidak mau *guyub* (nilai rukun) dengan tetangga, sombong, bahkan *medit* (pelit).

Hubungan sosial dalam masyarakat Jawa sudah terinternarlisasikan sejak kecil. Tatanan dalam masyarakat mencakup suatu sistem hubungan heirakhis antara kedudukan-kedudukan moral yang tak sederajat, dalam mana tiap kedudukan mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Sistem hubungan harus laras, harmonis, dan rukun (Mulder,1999:2333). Hidup rukun adalah cara untuk menciptakan relasi yang harmonis di anantara orang-orang yang dkat yang tidak harus intim/akrab, tetapi cukup dekat untuk harus hidup bersama satu sama lainnya. Ada penekanan untuk rukun yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup, untk hidup bersama, saling berbagi, pinjam meminjam, dan sebagainya. Dengan kata lain, penrekanan ini melancarkan roda sistem kewajiban yang saling berkaitan dari hubungan- hubungan antar manuia (Mulder,1999:234).

SIMPULAN

Bagi masyarakat di pedesaan baik yang berasal dari suku Jawa maupun Madura, memandang uang sebagai alat tukar menukar, alat bayar,atau komoditi yang dapat diperjualbelikan, juga sebagai simbol kebersamaan melalui lembaga tradisional gotong royong, investasi tradisional (tukar menukar), religi, dan status sosial, dan kewajiban sosial lainnya. Jadi, uang difahami sebagai alat untuk kelancaran kegiatan ekonomi, hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan sang pencipta, jadi berfungsi sebagai jalinan hubungan baik secara secara vertikal dan horizontal. Dalam hal ini uang mendapatkan makna sosial yang kadang-kadang melebihi makna atau fungsi-fungsi ekonomi.

Bagi masyarakat kota, uang dipahami sebagai satuan hitung, alat pertukaran, dan alat bayar. Di samping itu, juga masih ada pandangan bahwa uang sebagai gejala untuk mengikat hubungan sosial, melalui acara-cara selamatan, keagamaan, serta politik. Masyarakat kota sudah sangat dipengaruhi oleh efek monetisasi serta kecanggihan ekonomi dalam penggunaan uang, sehingga ada beberapa hubungan khusus serta kewajiban sosial yang sudah diganti oleh uang. Di kota baik masyarakat Jawa maupun Madura (sebagian kecil), dalam batas-batas tertentu uang digunakan untuk kompensasi ketidakhadiran seseorang dalam suatu aktivitas masyarakat, atau keluarga yang sedang mengadakan suatu bentuk kegiatan selamatan. Di perkotaan ada kecenderungan di mana uang mengalami perubahan posisi, dari posisi uang sebagai sarana menjadi tujuan. Seseorang yang tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas komunal dapat melakukan kompensasi dengan membayar sejumlah uang. Penggunaan uang oleh masyarakat perkotaan adalah munculnya gejala objektif, di mana aktivitas sosial dapat diukur oleh kuantitas uang. Bentuk-bentuk aktivitas sosial yang telah mengalami pengukuran uang seperti tanggung jawab sosial (ronda), sumbangan sosial, dan kegiatan keagamaan.

Dari hasil temuan di lapangan, uang yang bagi sebagian besar para ekonom dipahami sebagai instrumen pertukaran ekonomi, ternyata oleh individu (aktor di lapangan) dipahami sebagai suatu realitas yang kompleks dan memiliki multidimensi.

Dari sudut antropologi dan sosiologi, uang dipahami sebagai alat untuk menyelenggarakan acara selamatan, keagamaan, dan kompensasi untuk membebaskan seseorang dari kewajiban sosial, serta ada unsur politik untuk

mempengaruhi seseorang. Jadi uang sangat berpengaruh bagi realitas ekonomi dan juga bidang kehidupan sosial lainnya.

Penggunaan uang dibimbing oleh nilai-nilai tradisi budaya serta maksud dari pengguna uang itu sendiri. Uang cenderung digunakan untuk tujuan praktis, belum dijadikan tujuan jangka panjang, sehingga budaya menabung masih sangat asing bagi masyarakat terutama di pedesaan.

Utang adalah gejala pinjam meminjam uang yang tidak perlu diketahui oleh siapapun, hanya peminjam dan yang memberi pinjaman. Pada umumnya mereka berutang untuk memenuhi kebutuhan dasar (konsumsi), serta untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti uang pendidikan, barang mewah, dan sebagainya. Penggunaan utang tidak didasarkan oleh kebutuhan utama, akan tetapi juga diikuti oleh kepentingan pribadi si peminjam. Alasan berutang bermacam-macam, di pedesaan alasan kebutuhan ekonomi dan sosial sangat dominan. Utang dilakukan oleh masyarakat pada saat terjadi musim undangan, dan meningkat pada masa anak-anak membutuhkan biaya pendidikan, serta pada hari-hari besar Islam (hari raya). Selain itu, pada umumnya warga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan serta gengsi sosial melalui utang. Masyarakat kota cenderung lebih personal dalam utang berutang, karena fasilitas utang dapat dilakukan secara pribadi melalui instansi atau lembaga keuangan baik swasta maupun pemerintah. Alasan berutang pun beragam, dari mulai kebutuhan untuk pendidikan anak-anak, sampai barang konsumtif, bahkan sebagai gaya hidup masyarakat kota yang sedang menjamur dewasa ini dengan jalam membeli barang mewah melalui kredit.

Kredit untuk masyarakat pedesaan belum dipahami sebagai kredit produktif, tetapi cenderung sebagai kredit untuk bertahan hidup, sehingga kredit masih diamsusikan untuk peminjaman sesaat. Aktivitas perkreditan secara tradisional masih berlangsung secara aktif di pedesaan. Pada umumnya masyarakat desa pun sudah paham bahwa kredit tradisional bunganya tinggi. Akan tetapi, masyarakat belum dapat menghindari atau mencari solusi yang menguntungkan karena kurangnya sosialisasi perkreditan dari pihak yang berwenang mengenai perkreditan. Kredit dari pemerintah masih dimaknai sebagai hibah, sehingga pemahamannya adalah tidak usah melunasi utang piutang kepada lembaga resmi pemerintah yang memberikan pinjaman.

Berbeda dengan rentenir yang tetap dapat eksis di pedesaan karena ada faktor budaya yang dapat melanggengkan aktivitas kredit tradisional ini. Secara sosiologis, hubungan sosial antara kreditor (rentenir) dengan peminjam (nasabah) berjalan dengan akrab atau tidak menimbulkan permusuhan, kecuali apabila terjadi mangkir membayar. Hubungan personal antara nasabah dengan rentenir mempermudah nasabah meminjam uang tanpa anggunan dalam transaksi pinjam meminjam, uang mudah diberikan tanpa harus melengkapi administrasi yang dianggap menyulitkan, serta adanya saling kepercayaan. Masyarakat menganggap pinjam di bank sangat rumit, karena hubungan bersifat impersonal dengan aturan-aturan yang dianggap menyulitkan, walaupun bunga yang diterapkan rendah.

Menarik untuk dikaji lebih jauh, hubungan antara nasabah dengan rentenir berkaitan erat dengan aktivitas sosial dan keagamaan. Citra rentenir di mata

masyarakat tidak seburuk yang disangkakan oleh pemerintah dan masyarakat lainnya. Di mata masyarakat, rentenir adalah warga biasa, mereka pun terlibat dalam kegiatan sosial bahkan keagamaan. Para rentenir, biasanya tetap memberikan sumbangan untuk kegiatan amal (keagamaan) dan sosial di desanya, serta memberikan perhatian kepada nasabah yang sedang mengalami duka. Sikap mereka dalam mengambil bunga tinggi yang kemudian dinamakan lintah darat menjadi tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat secara kuat. Dapat dikatakan uang yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial dapat dijadikan semacam legitimasi dalam memperkuat aktivitas ekonominya. Jadi, rentenir merupakan sosok yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama di pedesaan dalam rangka memutar roda perekonomian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka.1983. Antropologi Sosial dalam Pembangunan. Bandung: Transito.
- Damsar.2006. Sosiologi Uang. Padang. Andalas University Press.
- Djoyohadikusumo, Sumitro.1989. Kredit Rakyat di Masa Depresi. Jakarta:LP3ES.
- Kartodirdjo, Sartono. 1986. Perkembangan Historiografi Indonesia. Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia.
- Gottshclak, L. 1986. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zed, Mestika.2002.” Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial Akhir”. Dalam J. Thomas Lindblad. Fondasi Historis Ekonomi ndonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dengan Pustaka {Pelajar.